

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN
RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

Rizki Transiska
NIM.: 14120015

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Transiska
NIM : 14120015
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Rizki Transiska
NIM. 14120015

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)

yang ditulis oleh:

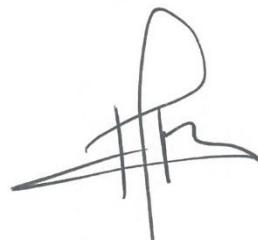
Nama	:	Rizki Transiska
NIM	:	14120015
Jurusan	:	Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Dosen Pembimbing,



Dra. Himayatul Ittihadiyah, M. Hum
NIP. 19700216 199403 2 013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DA/PP.00.9/ 3599/2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN RESPON UMAT ISLAM DI JAMBI (TAHUN 1915-1942 M)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI TRANSISKA
Nomor Induk Mahasiswa : 14120015
Telah diujikan pada : Senin, 12 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Himayatul Ittihadiyah, M.Hum.
NIP. 19700216 199403 2 013

Pengaji I

Dr. Badrun, M.Si.
NIP. 19631116 199203 1 003

Pengaji II

Herawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720424 199903 2 003

Yogyakarta, 12 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

DEKAN

Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
NIP. 19610727 198803 1 002



MOTTO

*All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;*

--J. R. R. Tolkien



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Apak, Mak,

Wo Na, Ngah Abil, Ayuk Nan, Bang Per, Ayuk In

Seluruh keluarga, sahabat, serta teman-teman seperjuangan SKI 2014



ABSTRAK

Sejarah pendidikan di Jambi tidak terlepas dari Islam sebagai agama serta situasi dan kondisi sosial politik di Jambi masa itu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam berupa madrasah di Jambi mulai berdiri pada 1915 M. Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda telah berkuasa di Jambi. Untuk melanggengkan kekuasaannya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut salah satunya digunakan untuk menekan pendidikan umat Islam yang merupakan momok bagi Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya yaitu politik etis, Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar yang juga diimplementasikan di Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan pendidikan kolonial di Jambi serta sikap umat Islam merespon kebijakan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu politik. Adapun konsep yang diterapkan ialah proses kebijakan menurut Andrew Heywood. Ada empat tahapan dalam proses kebijakan menurut Andrew Heywood, yaitu prakarsa atau usulan kebijakan; perumusan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan. Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat Hindia Belanda dalam bidang pendidikan dan kaitannya dengan gerak sejarah pendidikan Islam di Jambi.

Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial yang diimplementasikan di Jambi ialah pendirian sekolah untuk pribumi, Ordonasi Guru 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar. Sekolah-sekolah Belanda yang didirikan untuk pribumi di Jambi bersifat diskriminatif dan kuat unsur kepentingan Belanda saja. Di samping itu, para guru madrasah dan kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam di Jambi mengalami pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa lembaga pendidikan di Jambi yang mengalami penutupan karena imbas Ordonansi Sekolah Liar. Adapun respon umat Islam di Jambi menghadapi politik pendidikan Belanda tersebut ialah sikap enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda serta kebencian mendalam terhadap Belanda yang dianggap pemerintah kafir. Selain itu, sikap institusi pendidikan pada umumnya cenderung defensif dan menghindari konflik ketika menghadapi kebijakan pendidikan kolonial. Sikap tersebut diambil demi keberlangsungan pendidikan Islam di Jambi, sebab beberapa sekolah seperti Sumatera Thawalib dan *Neutrale Hollandsch Indlandsche School*, mengalami penutupan akibat Ordonansi Sekolah liar.

Kata kunci: Kebijakan, Hindia Belanda, Pendidikan Islam, Jambi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan Pencipta dan Pemelihara alam semesta, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi (Tahun 1915-1942 M)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah saw., manusia pilihan pembawa risalah Ilahi dan pemberi kabar gembira bagi seluruh alam.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyumbangkan ilmu, waktu, pikiran, dan tenaga guna terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya, Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya beserta jajarannya, Ketua Jurusan SKI beserta jajarannya, dan segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Bapak Dr. Muhammad Wildan, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik; Ibu Dra. Himmayatul Ittihadiyah, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini; Ibu Herawati, M.Pd. selaku penguji yang juga berperan besar mengarahkan serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini; serta seluruh dosen Jurusan SKI yang telah membagikan ilmunya yang bermanfaat, semoga Allah swt. membalas segala amal baik mereka semua.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan SKI 2014 yang tidak henti-hentinya saling menyemangati. Terima kasih untuk Kak Dina, Zanna, Nila, Zakiya, Fauzi, Nuril, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kita dipertemukan bersama kembali dalam keadaan yang lebih baik. Untuk Lucky, terima kasih untuk persahabatan serta banyak warna kehidupan yang kita toreh bersama di kota pelajar ini. Untuk Reny dan Lia, terima kasih telah rajin menyemangati penulis dari kampung halaman, agar merampungkan tugas akhir ini. Untuk Duli dan Umi, terima kasih telah menjadi teman seatap tempat berbagi banyak rasa kehidupan. Untuk Fitri, Salma, Ningrum, Suryo, Andi, Agus, Danang, dan Kak Iyan, terima kasih telah menjadi teman yang menyemarakkan hari-hari berat merampungkan revisi. Untuk Mbak Endah, Ii', Bang Zul, Benny, Aryan, Aziz dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, serta abang-abang, ayuk-ayuk, dan adik-adik KAMANJAYO, terima kasih sudah menjadi keluarga yang hangat di perantauan ini. Terima kasih juga untuk Hani, Uzy, Fatimah, Devi, Kak Nareeyah, Angga, dan Asror telah menjadi teman seatap selama beberapa bulan KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 93 di Dukuh Kuwiran.

Terima kasih dan rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada M. Nasir dan Halimah, apak dan mak tercinta yang dari mereka doa dan dukungan selalu tercurah, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Cinta kasih tak terbatas dan kerja keras yang mereka lakukan untuk anak-anaknya adalah

pemberian luar biasa dari Sang Pencipta. Untuk kakak-kakak penulis, Zarlina, Arabil, Lisnarti, Firdaus, (Almh.) Indri Lestari, terima kasih telah memberikan banyak perhatian, kasih sayang, dan pengajaran tentang kehidupan. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Abdul Latif bin Lawan dan keluarga besar H. Bukri yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Penulis sangat bersyukur terlahir dalam keluarga ini. Semoga penulis dapat membanggakan mereka.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya dalam kata pengantar ini, penulis sampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan dari semuanya. Berkat doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Diharapkan masukan dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi karya yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Januari 2019

Penulis,

Rizki Transiska
NIM. 14120015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: MASYARAKAT ISLAM DAN KOLONIALISME DI JAMBI	20
A. Hubungan Awal Jambi dan Belanda	20
B. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Jambi.....	34
C. Keadaan Sosial Pendidikan Masyarakat Jambi	37

BAB III: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOLONIAL SERTA REAKSI UMAT ISLAM DI JAMBI.....	44
A. Pendirian Sekolah Belanda untuk Pribumi	44
B. Pendirian Institusi Pendidikan Islam.....	53
C. Penerapan Ordonansi terkait Pendidikan.....	63
D. Penentangan Tersembunyi dan Perlawanan Terbuka.....	71
BAB IV: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Residen Jambi Tahun 1906-1942	29
Tabel 2	Jumlah <i>Volkschool</i> di Daerah Jambi Tahun 1933 dan 1935	50



DAFTAR SINGKATAN

ELS	<i>Europesche Lagere School</i>
CVO	<i>Cursus voor Lagere Onderwijs</i>
HCS	<i>Hollands Chinese School</i>
HIS	<i>Hollandsche Inlandsche School</i>
MULO	<i>Middelbare Uitgebreid voor Lager Onderwijs</i>
VOC	<i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Staatsblad van Nederlansch-Indie</i> tahun 1905 No. 550.....	85
Lampiran 2 <i>Staatsblad van Nederlansch-Indie</i> tahun 1925 No. 219.....	88
Lampiran 3 <i>Staatsblad van Nederlansch-Indie</i> tahun 1932 No. 494 dan 495..	91
Lampiran 4 <i>Staatsblad van Nederlansch-Indie</i> tahun 1906 No. 239	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dimulai bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.¹ Bentuk pendidikan juga terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial politik masyarakat di Indonesia. Perkembangan tersebut dimulai dari bentuk pendidikan yang sederhana berupa pendidikan (pengajaran) tentang Islam sebagai upaya menyebarkan agama Islam oleh *muballigh* maupun pedagang Muslim, hingga terus berkembang seperti sekarang menjadi sebuah sistem dan lembaga pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Unsur pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dengan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, di Jambi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, banyak terdapat pesantren atau madrasah yang didirikan oleh kaum Muslimin. Sejarah pendidikan yang ada di Jambi ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari Islam sebagai agama serta situasi dan kondisi sosial politik di Jambi masa itu. Perkembangan awal pendidikan Islam di Jambi yang bercorak formal dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda telah menduduki Jambi, sehingga kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda turut memengaruhi pendidikan Islam yang berkembang di Jambi.

¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 169-171.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren/madrasah)² di Jambi pada masa kolonial mulai berdiri pada pertengahan dekade kedua abad ke-20.³ Sekitar tahun 1912-1914, beberapa ulama Jambi yang menuntut ilmu di Mekah kembali ke Jambi. Sekembalinya ke Jambi mereka kemudian mendirikan Tsamaratul Insan, sebuah organisasi yang kemudian dalam perkembangannya mendirikan lembaga pendidikan Islam di Jambi. H. Abd al-Shamad, H. Ibrahim bin ‘Abd al-Majid, Kemas H. Muhammad Shaleh bin Kemas H. Muhammad Yasin, H. Ahmad bin ‘Abd al-Syukur, dan Utsman bin H. Muhammad ‘Ali, Sayyid Ali adalah para ulama yang menuntut ilmu di Mekah. Mereka pernah menghadiri *halaqah* Ahmad Khatib al-Minangkabawi serta belajar di Madrasah Saulatiyyah Mekah.⁴ Sekembalinya dari menuntut ilmu di Mekah pelajar-pelajar dari Jambi tersebut mendirikan *kuttab* (tempat baca-tulis) yang sederhana pada tahun 1914. Setelah itu, mereka mendirikan Tsamatul Insan dan mendapat izin resmi dari Residen Jambi pada tahun 1915.⁵

²Pesantren dan madrasah pada dasarnya sama-sama merupakan model pendidikan Islam. Penggunaan model pendidikan pesantren pada umumnya lebih banyak digunakan di Jawa, sebagaimana *surau* di Sumatra Barat, *meunasah* dan *rangkang* di Aceh, dan model pendidikan madrasah yang juga diterapkan di Jambi. Karakteristik awal lembaga pendidikan Islam di Jambi adalah madrasah. Dalam praktiknya, madrasah-madrasah di Jambi mengembangkan model pendidikan Islam tradisional, yang bercirikan kajian kitab kuning, figur tuan guru (kiai), murid, dan pondok. Karakteristik tersebut mirip dengan pesantren di Jawa, tetapi minus masjid. Sistem pesantren, yang berakar pada tradisi Jawa, adalah yang paling luas memengaruhi model pendidikan Islam di Indonesia secara umum. Ada pula sumber yang menyebutkah bahwa Madrasah-madrasah yang ada di Jambi, pada perkembangannya kemudian dinamakan sebagai Pondok Pesantren untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Lihat Muhammad Qodri, “Dinamika Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Pondok Pesantren Aljauharen Kota Jambi”, dalam *Media Akademika*, Vol 25, No. 3, Juli 2010, hlm. 204; dan Ali Muzakkir, “Transformasi Pendidikan Islam di Jambi: Dari Madrasah ke Pesantren”, dalam *Islam Relitas: Journal of Islamic & Social Studies* Vol. 3, No. 1, Januari- Juni 2017, hlm. 9.

³Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 193. Lihat juga: Yunus, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 169-171.

⁴Muzakkir, “Transformasi Pendidikan”, hlm. 10.

⁵*Ibid.*, hlm.11.

Di sisi lain, pada masa tersebut pemerintah Hindia Belanda sedang menerapkan politik etis yang salah satu tujuannya menghendaki pendidikan bagi pribumi tetapi pada kenyataannya cenderung menekan pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan para tokoh agama/ulama yang mendirikan dan mengajar di pesantren atau madrasah dianggap mengusik bahkan dapat mengancam kelangsungan kekuasaan Belanda. Keadaan politik saat itu menampilkan pemerintah Hindia Belanda di satu sisi berusaha memperkuat serta melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, dan di sisi lain umat Islam Indonesia yang berupaya keras untuk melepaskan diri dari cengkraman pemerintah Hindia Belanda.⁶ Oleh karena itu, untuk memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan untuk menekan upaya pribumi khususnya umat Islam yang menjadi penghambat bagi Hindia Belanda. Kebijakan tersebut di antaranya ialah kebijakan terkait pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.

Pada periode 1901-1942 M pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem politik etis dalam memerintah Indonesia. Arah politik Belanda yang menghendaki “balas budi” ini salah satunya diprakarsai oleh Van Deventer. Deventer merupakan seorang pendukung dari Van Dem, Van Kol, Broschooft dari golongan sosialis. Mereka mengkritik kemerosotan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda. Pada tahun 1899, Deventer menulis artikel di majalah *De Gids* yang berjudul “Utang Kehormatan”.⁷ Menurut Deventer,

⁶Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 1.

⁷Djohan Makmur, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm. 73. Lihat juga, S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Jemmars, 1983), hlm. 15.

Belanda berutang kepada bangsa Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperlakukan tidak adil oleh Belanda. Utang kehormatan itu sudah seharusnya dibayar kembali melalui peningkatan kesejahteraan pribumi melalui irigasi, edukasi, dan emigrasi.⁸ Politik etis ini dalam teorinya diharapkan dapat memberikan edukasi (pendidikan), emigrasi (pemindahan penduduk), dan irigasi (pengairan) untuk menyejahterakan penduduk pribumi sebagai balas budi atas berjuta-juta gulden yang diterima Belanda dari negeri jajahannya tersebut.

Terkait pendidikan bangsa Indonesia, Belanda merasa berkewajiban moral untuk mengajar para bangsawan, dan menjadikannya sebagai partner dalam kehidupan budaya dan sosial.⁹ Pendidikan bagi pribumi yang dikehendaki pemerintah Belanda adalah pendidikan yang nantinya dapat menjadikan pribumi sebagai partner bagi Belanda. Oleh karena itu, pelaksanaan politik etis yang salah satunya menghendaki pendidikan bagi pribumi justru digunakan demi kepentingan pemerintahan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda cenderung mempersulit dan menekan pendidikan Islam yang dianggap tidak menguntungkan bagi Belanda. Selain itu, pendidikan Islam juga dikhawatirkan dapat mengusik kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda banyak membuat kebijakan-kebijakan yang menekan laju pendidikan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut antara lain yaitu politik etis, Ordonansi Guru, dan Ordonansi Sekolah Liar.¹⁰

Setelah dilaksanakannya politik etis, banyak lembaga pendidikan mulai didirikan, tidak terkecuali di Jambi yang pada tahun 1906 menjadi keresidenan

⁸M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 329.

⁹*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 46-63.

tersendiri di bawah pemerintah Hindia Belanda.¹¹ Sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda di daerah Jambi selama kurun waktu penerapan politik etis yaitu *volkschool*, *vervolgschool*, dan *Holandsche Inlandsce School* (HIS). Penyelenggaraan pendidikan di Jambi oleh Belanda di satu sisi ternyata bertentangan dengan semangat politik etis yang menghendaki pendidikan yang membawa kemajuan bagi pribumi. Penyelenggaraan pendidikan oleh Belanda hanya dapat ditempuh oleh golongan tertentu. Sementara itu, keberadaan pendidikan Islam, justru mengalami tekanan dan pembatasan. Keadaan tersebut mendatangkan berbagai respon dari umat Islam di Jambi. Respon tersebut dapat dilihat dari gerakan sosial berbasis pendidikan di Jambi serta sikap umat Islam di Jambi pada umumnya.

Topik penelitian ini dipilih karena sejarah pendidikan lokal belum banyak dikaji dan diteliti. Historiografi mengenai sejarah pendidikan kebanyakan berupa pemikiran, sedangkan penelitian sejarah pendidikan, umumnya di ranah nasional. Penelitian secara khusus dan mendalam tentang sejarah pendidikan Islam di daerah-daerah tertentu dinilai perlu dan sangat penting dilakukan untuk menjelaskan secara mendetail tentang bagian utuh dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap sejarah pendidikan Islam di Jambi masa kolonial. Pada masa tersebut kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial banyak membatasi gerak pendidikan Islam, tidak terkecuali di Jambi.

¹¹R. Zainuddin, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 30 dan 34.

Dampak kebijakan Ordonansi Guru 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932 terhadap perkembangan sejarah pendidikan Islam di ranah kajian lokal penting untuk dikaji. Kebijakan tersebut turut mewarnai perkembangan pendidikan Islam di Jambi. Ketika kebijakan pendidikan Hindia Belanda yang cenderung menekan laju atau gerak pendidikan Islam diberlakukan, bersamaan itu pula berdiri dan berkembang lembaga pendidikan Islam di Jambi. Kemampuan lembaga pendidikan Islam di Jambi bertahan menghadapi kebijakan kolonial yang menekan pendidikan Islam perlu juga dikaji dan diteliti secara mendalam dan sistematis.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan serta respon umat Islam yang dibahas dalam penelitian ini bersifat lokal yaitu dikhkususkan di daerah Jambi. Selain itu, ruang lingkup pendidikan Islam yang dimaksud ialah bentuk pendidikan Islam lokal berupa madrasah yang ada di Jambi.

Penelitian ini dibatasi dari tahun 1915 sampai 1942 M. Tahun 1915 merupakan tahun berdirinya lembaga pendidikan Islam formal berupa madrasah di daerah Jambi. Madrasah tersebut ialah Madrasah Nurul Iman yang didirikan oleh perukunan Tsamaratul Insan. Sementara itu, tahun 1942 merupakan akhir kolonial Belanda berkuasa di Indonesia.

Kebijakan pendidikan yang dimaksud ialah sebagai keseluruhan keputusan serta perundang-undangan hasil dari proses dan produk politik yang mengatur

penyelenggaraan pendidikan.¹² Termasuk di dalamnya keputusan pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis yang salah satu pilar pentingnya ialah penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi melalui pendirian sekolah-sekolah Belanda. Adapun kebijakan pendidikan yang dikaji dalam penelitian ini ialah politik etis, Ordonansi Guru 1925, dan Ordonansi Sekolah Liar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum pendidikan Islam di Jambi awal abad ke-20?
2. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan kolonial dalam bidang pendidikan di Jambi ?
3. Bagaimana respon umat Islam di Jambi dalam menghadapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memaparkan sejarah pendidikan Islam di Jambi paruh pertama abad ke-20.
2. Mendeskripsikan dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang menjadi latar belakang gerak sejarah pendidikan Islam di Jambi.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan Belanda dalam bidang pendidikan, serta implementasi kebijakan tersebut.
4. Memaparkan reaksi dan sikap umat Islam di Jambi terhadap kebijakan tersebut.

¹²Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan : Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 2.

5. Menjelaskan peranan tokoh agama atau organisasi Islam berbasis pendidikan dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam maupun lembaga pendidikan Islam di Jambi masa kolonial.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang bisa digunakan bagi penelitian sejarah pendidikan Islam di Jambi selanjutnya.
2. Dapat menjadi sumber tambahan bagi penelitian yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
3. Menambah karya sejarah/historiografi yang berkaitan dengan sejarah pendidikan lokal di Indonesia.
4. Sebagai pengungkap sejarah pendidikan Islam, khususnya madrasah di Jambi masa kolonial kurun waktu 1915-1942 M.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang terkait dengan topik kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan respon umat Islam di Jambi tahun 1915-1942 M adalah sebagai berikut:

Buku *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi* yang merupakan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Buku tersebut memuat keadaan daerah Jambi sejak akhir abad ke-19 hingga kedatangan Jepang tahun 1942. Sebagai suatu hasil dari proyek Inventarisasi dan Dokumentasi, maka isi dari

buku tersebut memiliki cakupan yang luas meliputi kehidupan pemerintahan, perekonomian, seni dan budaya, agama, kepanduan, pers, koperasi serta organisasi propesional. Permasalahan pendidikan di Jambi yang pada masa tersebut berada di bawah jajahan Belanda juga diulas secara umum. Buku tersebut merupakan suatu langkah awal penulisan tentang sejarah Jambi masa kebangkitan nasional. Adapun penelitian ini, menjadi pelanjut yang membahas aspek kebijakan Belanda atas pendidikan serta respon umat Islam di Jambi pada masa kebangkitan nasional secara lebih mendalam.

Buku *Politik Islam Hindia Belanda* karya Aqib Suminto. Pada buku tersebut, pokok pembahasannya ialah politik Islam yang dilakukan Hindia Belanda dalam rangka melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Batasan masalah dalam penelitian tersebut yaitu wilayah Indonesia secara umum, sedangkan batasan masalah dari penelitian yang dilakukan ialah lokal yaitu daerah Jambi. Selain itu, politik Islam yang dimaksud dalam buku *Politik Islam Hindia Belanda* karya Aqib Suminto cakupannya lebih luas, yaitu meliputi agama, budaya, Pan-Islamisme, tarekat, dan Kantoor voor Inlandsche zaken, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan pendidikan yang diterapkan di Jambi saja, berupa Ordonansi Guru 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932.

Buku *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* karya Mahmud Yunus yang memuat tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Buku tersebut memuat uraian singkat mengenai beberapa madrasah-madrasah yang ada di Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan dan melengkapi penelitian Mahmud Yunus terkait pendidikan Islam khususnya di Jambi.

Skripsi “Politik Pendidikan Kolonial Belanda dan Reaksi Umat Islam (1905-1938)” karya Norma Siregar, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Keterkaitan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah mengenai tema politik pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda serta reaksi yang umat Islam tunjukkan. Skripsi tersebut mengkaji reaksi umat Islam di skop nasional, diwakili oleh daerah-daerah tertentu maupun organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini skop spasialnya berskala lokal yaitu daerah Jambi saja. Pada sejarah nasional gaung reaksi umat Islam di Jambi terhadap kebijakan pendidikan Belanda hampir tidak terdengar dan tidak diketahui secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sejarah lokal Jambi, khususnya di bidang pendidikan sebagai bagian dari sejarah nasional.

Skripsi “Bangkitnya Nasionalisme sebagai Arah Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Pendidikan Era Kolonialisme Belanda 1908-1924)” karya Ahmad Mushowir, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia di era kolonial. Fokus kajiannya adalah tentang dinamika pendidikan. Persamaan penelitian Ahmad Mushowir dengan penelitian ini ialah mengenai tema pendidikan Islam masa kolonial. Letak perbedaan masing-masing penelitian ialah pada skop spasialnya. Mushowir mengkaji pendidikan Islam masa kolonial di wilayah Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini hanya difokuskan pada kasus Jambi. Selain itu, meskipun kategori waktu penelitian tersebut sama yaitu periode kolonial tetapi masing-masing penelitian berbeda dalam batasan tahunnya. Skripsi

karya Ahmad Mushowir penelitiannya menggunakan batasan dari tahun 1908-1924 M sedangkan penelitian ini batasan tahunnya ialah dari tahun 1915-1942 M.

Tesis “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Kota Yogyakarta 1912-1942” yang ditulis oleh Jahdan Ibnu Humam Saleh. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar Magister Humaniora dari Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Pascasarjana UGM pada tahun 1991. Pembahasannya ialah mengenai pendidikan Islam yang diadakan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Fokus kajian tesis tersebut ialah mengenai pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta sedangkan fokus kajian penelitian ini ialah mengenai pendidikan Islam di Jambi yang umumnya berupa madrasah.

Disertasi “Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Jambi: Studi terhadap Madrasah Nurul Iman” tulisan Fauzi MO Bafadhal. Disertasi tersebut merupakan karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008. Berisi tentang sejarah sosial pendidikan Islam di Jambi, khususnya Madrasah Nurul Iman sebagai salah satu madrasah yang awal-awal berdiri di Jambi pada masa kolonial. Skop bahasan sejarah sosial yang diangkat Fauzi MO Bafadhal pada dasarnya difokuskan pada Madrasah Nurul Iman saja. Pada penelitian ini dibahas mengenai permasalahan sosial-politik pendidikan Islam di Jambi secara umum, lembaga pendidikan yang dikaji bukan hanya Madrasah Nurul Iman, akan tetapi juga madrasah-madarasah maupun lembaga pendidikan Islam lainnya yang ada di wilayah Jambi.

E. Kerangka Teori

Penelitian dengan topik kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan respon umat Islam di Jambi ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode sejarah dengan perspektif politik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik. Pendekatan politik digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda diimplementasikan serta bentuk respon masyarakat muslim di Jambi.

Secara konseptual ada beragam pengertian kebijakan menurut para ahli. Namun, secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadipedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan.¹³

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menanggapi hal tersebut, Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi, sehingga mendefinisikan kebijakan hanya menekan pada apa yang diusulkan

¹³M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 38.

menjadi kurang memadai.¹⁴ Mengenai konsep kebijakan pendidikan secara khusus dimaksudkan sebagai keseluruhan keputusan serta perundang-undangan hasil dari proses dan produk politik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.¹⁵

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan gerak sejarah mengenai topik “Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi (1915-1942 M)” dengan melihat bagaimana tahapan-tahapan dan proses dari kebijakan berlaku. Pendapat Andrew Heywood dalam karyanya *Politik*, menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam proses kebijakan ada empat, yaitu prakarsa atau usulan kebijakan; perumusan kebijakan; implementasi kebijakan; dan evaluasi kebijakan.¹⁶ Teori ini digunakan sebagai *guide* dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, untuk melihat bagaimana setiap tahapan dalam proses kebijakan tersebut berkait dengan pendidikan Islam di Jambi. Serta untuk menunjukkan reaksi atas kebijakan tersebut (ketika berinteraksi dengan lingkungannya) yang dapat menghasilkan tuntutan baru atau usulan kebijakan baru (kembali ke tahap pertama) karena adanya umpan balik, baik berupa dukungan atau penolakan kebijakan tersebut. Bentuk implementasi kebijakan tersebut di Jambi juga dianalisis dalam penelitian ini.

Adapun cara penjabaran serta penyusunan penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara berpikir deduktif, sebab teori proses kebijakan Andrew Heywood yang dijadikan landasan penelitian ini adalah teori yang berlaku umum

¹⁴Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 4.

¹⁵Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan : Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 2.

¹⁶Andrew Heywood, *Politik*, terj. Ahmad lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 631-641.

(bersifat general), sedangkan spesifikasinya tidak lain adalah fakta-fakta sejarah sebagai jawaban atas masalah yang diidentifikasi dan ditunjukkan dalam pembahasan hasil penelitian ini.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau disebut juga metode sejarah. Metode adalah jalan, cara, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sedangkan yang dimaksud dengan penelitian, menurut Florence May Anna Hilbush, yaitu penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong, atau menolak suatu teori. Jadi, pengertian metode sejarah secara umum ialah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis.¹⁸ Secara lebih khusus lagi, Gilbert J. Garraghan mengemukakan dalam bukunya *A Guide to Historical Method*, metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.¹⁹

¹⁷Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 63.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 53.

¹⁹Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

Secara singkat, metode sejarah bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu, heuristik (pengumpulan sumber) verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan).²⁰

1. Heuristik

Heuristik (pengumpulan sumber) adalah langkah/metode mencari sumber-sumber yang terkait dengan topik yang diteliti. Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis. Menurut Kuntowijoyo terdapat empat bentuk pengumpulan sumber yaitu, dokumen tertulis, *artifact*, sumber lisan, dan data kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan sumber-sumber berupa dokumen tertulis, karena sumber kuantitatif yang berhubungan dengan angka-angka, akunting, pajak dan sebagainya dinilai tidak terlalu dibutuhkan dalam topik penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada *library research* yang penekanan sumbernya pada sumber tulisan berupa arsip, mengingat periode yang diteliti adalah masa kolonial.

Dokumen (dari bahasa Latin *docere*, berarti “mengejar”) tertulis dapat berupa surat-surat, notelen rapat, kontrak kerja, bon-bon, dan sebagainya.²¹ Dokumen tertulis sebagai sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian dokumen tertulis berupa arsip dan dokumen terkait lainnya di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan kantor-kantor arsip yang memiliki dokumen tertulis terkait topik yang dibahas. Untuk sumber data primer, peneliti

²⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 74. Lihat juga, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm.103-120.

²¹*Ibid.*

mendapatkan data dari arsip Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No. 550, Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219, Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495. Selain dokumen berupa arsip peneliti juga menggunakan rujukan-rujukan berupa hasil penelitian terdahulu/penelitian sebelumnya seperti karya ilmiah termasuk jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait dengan topik penelitian ini.

2. Verifikasi

Sumber-sumber atau data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi. Tahap verifikasi (kritik sumber) ini ada dua macam, yaitu autentisitas/keaslian sumber/kritik ekstern, dan kredibilitas/kebisaan dipercaya/kritik intern.²² Kritik ekstern adalah kritik dari sisi luar, dari segi fisiknya untuk menilai asli tidaknya sumber berupa dokumen tertulis atau arsip. Kriteria yang digunakan adalah: (a) Identifikasi yaitu mengenal arsip termasuk identifikasi penulis dan sosio-historisnya. (b) Eksplikasi yaitu menentukan unsur-unsurnya, seperti: bahasa yang digunakan, dialek, dan lain-lain. (c) Atribusi yaitu menetapkan kategori bahan, seperti: tinta, kertas, dan tanda tangan. (c) Kolasi yaitu membuat perbandingan dengan arsip lain.

Kritik intern adalah kritik dari dalam, mengkritisi isi arsip atau sumber untuk melihat kekredibilitasannya atau kesahihan dokumen tertulis atau arsip. Kriteria yang digunakan adalah dengan kolasi, yaitu membandingkan antara isi satu arsip dengan arsip yang lain atau kalau hanya satu arsip maka isinya

²²*Ibid.*, hlm. 77.

logis/berdasarkan pada kenyataan atau tidak.²³ Kriteria kritik ekstern dan intern ini peneliti gunakan untuk mendapatkan sumber yang autentik dan kredibel terkait permasalahan yang dibahas.

3. Interpretasi

Data sejarah atau sumber sejarah mengenai kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda dan respon umat Islam di Jambi tahun 1915-1942 yang telah melalui tahap verifikasi (telah dibuktikan keasliannya serta dapat dipercayai kebenarannya) kemudian diinterpretasikan oleh sejarawan/peneliti. Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa.²⁴ Interpretasi (penafsiran) yang dilakukan peneliti meliputi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis atau menguraikan data tersebut menjadi fakta sejarah. Sintesis berarti menyatukan, digunakan ketika data yang diperoleh banyak, maka data tersebut dikelompokkan sesuai konsep yang telah ditentukan dan kemudian disintesiskan.²⁵ Pada tahap interpretasi ini, peneliti melakukan analisis serta sintesis dengan mengacu pada teori yang sudah ditetapkan pada landasan teori.

4. Historiografi

Tahap selanjutnya ialah historiografi (penulisan), pada tahap ini data yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan menjadi sebuah karya ilmiah. Aspek kronologis sebagai aspek yang sangat penting dalam penulisan sejarah

²³*Ibid.*, hlm. 74.

²⁴Abdurrahman, *Metodologi Penelitian*, hlm. 114.

²⁵Kuntowijowo, *Pengantar Ilmu*, hlm. 78-80.

menjadi bagian penting yang tidak lepas dari penulisan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga memaparkan laporan hasil penelitian ini secara deskriptif-analitis. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan memiliki tiga bagian, yaitu: pengantar; hasil penelitian; dan kesimpulan.²⁶ Penulisan hasil penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Jurusan SKI UIN Sunan Kalijaga yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bab pendahuluan, di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi bagian yang mengantarkan topik penelitian ini pada pemaparan masalah yang ada pada bab selanjutnya.

Bab II adalah bab yang menguraikan tentang gambaran umum masyarakat Islam dan kolonialisme di Jambi. Menguraikan mengenai hubungan awal Jambi dan Belanda, keadaan sosial keagamaan, termasuk juga mengenai aspek pendidikan Islam dan perhatian umat Islam di Jambi terhadap pendidikan Islam pada awal abad ke-20 M. Bab ini memaparkan keterkaitan Islam, keadaan sosial, perekonomian, serta politik masyarakat Jambi. Penggambaran mengenai keadaan sosial masyarakat Jambi di tengah keadaan perpolitikan Islam dan kolonialisme ini nantinya digunakan sebagai *setting* dinamika pendidikan Islam di Jambi serta peranan dari masyarakatnya.

²⁶*Ibid.*, hlm. 80-81.

Bab III berisi uraian tentang bentuk implementasi kebijakan Belanda terkait pendidikan di Jambi pada tahun 1915-1942 M. Di dalamnya dipaparkan tentang pendidikan Belanda di Jambi sebagai wujud dari penyelenggaraan kebijakan etis. Kemudian, dibahas pula mengenai pendidikan Islam formal di Jambi yang berdiri pada abad ke-20. Penerapan ordonansi terkait penyelenggaraan pendidikan oleh pribumi, serta sikap umat Islam di Jambi merespon kebijakan tersebut dibahas juga dalam bab ini.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di dalamnya memuat tentang hasil dari analisis atas data dan fakta yang telah dihimpun atau jawaban-jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pertama. Bab ini juga memuat saran-saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum abad ke-20, di Jambi tidak terdapat lembaga pendidikan formal yang didirikan pemerintah Hindia Belanda. Pada masa tersebut, pendidikan yang terdapat di Jambi ialah pendidikan Islam dengan sistem surau yang pelajarannya berfokus pada soal-soal pokok agama Islam saja. Model pendidikan Islam tersebut masih sederhana. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat Jambi mulai banyak menyekolahkan anak-anaknya ke Madrasah Saulatiyyah di Mekah untuk belajar ilmu agama secara lebih mendalam lagi.

Pada 1901 pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan politik etis di Indonesia, akan tetapi, pada masa tersebut Belanda masih disibukkan dengan perlawanan yang dilakukan masyarakat Jambi di bawah komando Sultan Taha. Bahkan, ketika Jambi menjadi keresidenan pada 1906, sekolah Belanda untuk pribumi belum banyak menyentuh wilayah Jambi. Selain karena Belanda masih sibuk menjinakkan masyarakat Jambi, ketertinggalan penyelenggaraan politik etis bagi masyarakat Jambi juga dikarenakan perekonomian Jambi yang tidak terlalu menguntungkan bagi Belanda. Pada dasawarsa ke-dua dan ke-tiga abad ke-20, ketika Belanda berhasil membawa ekonomi Jambi yang sebelumnya lebih bersifat subsistens ke arah ekonomi yang berorientasi pasaran dunia yang bersifat agresif, pemerintah kolonial mulai membangun infrastruktur serta mendirikan lembaga pendidikan formal di Jambi berupa *volkschool*, *vervolgschool*, dan HIS.

Cita-cita politik etis dalam praktiknya tidak berjalan sebagaimana yang diidealkan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi, terutama pendidikan Islam justru ditekan oleh Belanda. Pemerintah Hindia Belanda masih berpijak pada pragmatisme dan perhitungan untung-rugi. Pendidikan Islam dinilai tidak menguntungkan Belanda bahkan membahayakan. Hal itu dikarenakan para tokoh agama/ulama yang mendirikan dan mengajar di madrasah dianggap mengusik bahkan dapat mengancam kelangsungan kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pendidikan Islam yang dinilai mengkhawatirkan.

Ordonansi Guru yang pertama pada tahun 1905 belum berlaku di Jambi. Cakupan kebijakan tersebut hanya meliputi Jawa dan Madura. Ordonansi Guru 1925 tidak pernah secara resmi dinyatakan berlaku di Jambi, akan tetapi secara praktik aturan-aturan pengawasan terhadap guru agama di Jambi diterapkan. Ordonansi tersebut dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pelajar dan pengajur Islam di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan *Staatsblad van Nederlansch-Indie* tahun 1932 No. 494 dan 495, yang mengatur mengenai sekolah liar, yakni sekolah swasta yang tidak disubsidi pemerintah. Ordonansi Guru 1925 mulai berlaku juga di Jambi sedikit banyak dikarenakan pendidikan Islam di Jambi pada paruh pertama abad ke 20 mengalami perkembangan pesat.

Wujud implementasi kebijakan Ordonansi Guru yang dialami pendidikan Islam di Jambi ialah berupa pengawasan yang ketat terhadap para guru di madrasah

atau sekolah swasta, serta kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan tersebut. Mengenai implementasi Ordonansi Sekolah Liar, Belanda dengan ketat melakukan penutupan terhadap beberapa sekolah di Jambi, seperti, *Neutrale Hollandsch Indlandsche School* yang didirikan Ahmad Basuki dan Guru Hasan, serta sekolah Sumatera Thawalib yang berdiri di Kerinci dibawah pimpinan H. Azhari. Sekolah Saqafah Islamiyah di Dusun Gurun Tuo Sarolangun yang didirikan H. Nawawi, juga sempat tidak mendapatkan izin dari pemerintah kolonial. Namun, melalui protes yang dilakukan akhirnya sekolah tersebut dapat berdiri. Terhadap madrasah-madrasah yang telah didirikan sejak tahun 1915 oleh Tsamaratul Insan, *Nederlandsche School* di Sarolangun yang didirikan M. Chatib Tabun, dan *Schakel School* di Sarolangun yang didirikan oleh H.M. Chatib dan A.T. Hanafiah, pemerintah Belanda tidak mengenakan Ordonansi Sekolah Liar sehingga madrasah-madrasah tersebut tidak ditutup. Meskipun begitu, guru-guru serta kurikulum pengajaran lembaga pendidikan tersebut tetap mendapatkan pengawasan yang ketat dari Belanda.

Menanggapi berbagai kebijakan pemerintah kolonial tersebut, respon masyarakat Jambi cenderung defensif meskipun penolakan terhadap kebijakan tersebut tetap tampak. Bentuk respon umat Islam Jambi terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda terkait pendidikan secara umum terrepresentasikan oleh Tsamaratul Insan termasuk madrasah-madrasah dibawahnya serta sikap masyarakat Jambi pada umumnya. Mereka tidak melakukan perlawanan yang agresif dan melibatkan serangan fisik, akan tetapi menunjukkannya dengan mematri semangat anti kafir di sanubarinya. Materi-materi pelajaran untuk madrasah-madrasah di

Bawah Tsamaratul Insan menolak ilmu umum, bahkan pakaian-pakaian yang identik dengan Belanda juga dilarang. Hal tersebut terjadi mengingat juga karena kejemuhan sebagian masyarakat atas Perang Jambi yang hampir setengah abad, serta politik isolatif yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap Jambi pasca Perang Sarekat Abang. Pembersihan bibit pemberontakan di Jambi dari akarnya serta menutup Jambi dari segala pergerakan nasional yang berlaku di luar wilayah Jambi, telah mendorong sikap defensif masyarakat Jambi dalam merespon kebijakan kolonial Belanda.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan di sana-sini. Namun, peneliti berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pembelajaran, dan pengembangan dalam penulisan karya ilmiah sejarah yang linear dengan topik ini. Penulis menyadari masih banyak celah yang dapat diteliti oleh peneliti lain maupun oleh penulis sendiri di kemudian hari.

Mengenai kelanjutan penelitian terhadap topik kajian yang linear dengan penelitian skripsi ini, penulis mengungkapkan catatan-catatan yang kiranya dapat membantu keberlangsungan peneletian selanjutnya. Sejarah Jambi tidak banyak ditulis dan tidak mudah pula untuk diakses masyarakat luas, termasuk mengenai pendidikan Islam di Jambi. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses heuristik secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Andaya, Barbara Watson. *Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. terj. Septian Dhaniar Rahman dan Aditya Pratama. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Ankersmit, F.R. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Masa Pendudukan Jepang*. terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Chatib, Adrianus. *Kesultanan Jambi dalam Konteks Sejarah Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Daliman, A. *Sejarah Indonesia Abad XIX-awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintah Hindia Belanda*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, 1957.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Heywood, Andrew. *Politik*. terj. Ahmad lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, jilid II. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- , *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Kweit, Mery Grisez dan Robert W. Kweit. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. terj. Ratnawati. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- Makmur, Djohan, dkk. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Nasruddin, Mukty. *Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-1992*. Jambi: 1987.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars, 1983.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Pondok Pesantren Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan perkembangannya*. Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Pito, Toni Andrius. dkk. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Sahid, Komarudin. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3S, 1986.
- Suharno. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Suminto, Aqib H. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Tim Peneliti IAIN STS Jambi. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Jambi” *Laporan Penelitian*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1980.
- Tideman, J. *Djambi*. Amsterdam: Bruk de Bussy, 1938.
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*. terj. E. Setyowati A. Dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zainuddin, R. dkk. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- *Sejarah Pendidikan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

B. Jurnal

- Ali Muzakkir. “Transformasi Pendidikan Islam di Jambi: dari Madrasah ke Pesantren” dalam *Islam Relitas: Journal of Islamic & Social Studies* Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2017.
- Farid Setiawan. “Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3, No 1, Juni 2014.
- Jang A. Muttalib, “Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi Pada Perempatan Pertama abad ke-20” dalam *Jurnal Prisma*, No. 8, Tahun IX. Jakarta: LP3ES, 1980.
- M. Husnul Abid. “Saifuddin atau Safiuddin?: atau Jambi di Pinggir Sejarah” dalam *Jurnal Kontekstualita*. Vol. 25, No.2, 2010.
- Moh. Slamet Untung. “Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Pesantren” dalam *Forum Tarbiyah* Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- Muhammad Sofwan dan Akhmad Habibi. “Problematika Dunia Pendidikan Islam Abad 21 dan Tantangan Pondok Pesantren di Jambi” dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. 46, No. 2. November 2016.
- Siti Heidi Karmela. “Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Kota Jambi” dalam *Dikdaya*. Vol. 05, No. 01. April 2015.
- Taufik Abdullah. “Reaksi terhadap Perluasan Kuasa Kolonial: Jambi dalam Perbandingan”, dalam *Jurnal Prisma* No. 11, Tahun XIII. Jakarta: LP3ES, 1984.

C. Tesis dan Disertasi

Budihardjo. “Perkembangan Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Daerah Jambi 1926-1942” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

Fauzi MO Bafadhal. “Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Jambi” *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Muhammad Fadhil. “Pembaharuan Pendidikan Islam KH. Abdul Qadir di Madrasah As‘ad Seberang Kota Jambi 1951-1970,” *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Saleh, Jahdan Ibnu Humam. “Perkembangan Pendidikan Muhammadiyah pada Pemukiman Santri di Kota Yogyakarta 1912-1942” *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1991.

D. Internet

<http://www.smpn1jambi.sch.id/html/profil>

<http://www.jambiupdate.co/artikel-sekolah-cagar-budaya-jambi-smpn-1-sekolah-tertua.html>

LAMPIRAN 1

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No. 550.

2000

THEORY OF THE EARTH

(1) Met de volgende voorwaarden voor deelname aan de loterij:

- c. het geven van Medische- en gezondheidswetenschappelijke dienstverlening en/of vergoeding, als beloofd, in verband met een gezondheid of een andere ziekte of een ongeval die in de volgzaamheid is aangegeven;
 - b. deelname aan de volgzaamheid of de gezondheid, toekondiging of opvolging van het resultaat, vermeld in artikel 1, dat wel aangeving en daarvan vraag is verheven aan de dienstverleende personen of om welke diensten de verlangde inlichtingen te verschaffen betreffende het onderwijs en de leerlingen, of toegang te regeleken tot de inrichtingen van onderwijs en de leefplaatsen der leerlingen;
 - c. het aannemen als leerling van personen, die volgens de door het Hoofd van gewestelijk bestuur ter zake gegeven voorstrijfsten, als zondaar uitgesloten zijn;
 - d. het zich in strijd met de te dien aanzielen gehoudene voorstrijfsten of onder een valsche naam, door een gidsdienstleeraar als leerling doen inschrijven;

(2) Ingeval van herhaling der overtreding, kan boete worden opgelegd tot één honderd gulden of gevangenisstraf dan wel tegrarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon tot dertig dagen.

(3) De aan een godsdienstleeraar verleende vergunning kan wegens herhaalde overtreding der voorschriften of wegens wan gedrag — dit laatste ter beoordeeling van den Regent, den zelfstandigen Patih of, waar geen zoodanige Inlandsehe ambtenaren beschikbaar zijn, van het Hoofd van plaatselijk bestuur — worden ingetrokken.

N.P. 603

11. Deel 1. Naar de volgende dat vermelding te allen tijde
wordt gegeven, dat het aantal van gescrevenlijf bewezen.

Artikel 3

In gevallen, dat bij de concreetopstelling dient vermelden, dat
deel 1. is gedownloaded door een bepaalde medewerker, moet
daarbij de naam bevestigd worden, en de datum op welke dat is gebeurd.
Die medewerker die dat concreet opstelt dient vermelden, dat
die gedownload is gedownload door een bepaalde medewerker van de
republiek, en dat vermelden.

Artikel 4

In gevallen, dat deel 1. vermelding opstelt, en daarin, niet
vermelder, dat deel 1. gedownload.

Het opdat nietstand houdt onverhoochd voorzichtig, dat deze in
het Standaard van Nederlandse Indië gedownload en voor zover
moedig, in de Indiëstede en Uitvaartsteden aangeplakt worden.

Gedownload bevestigd, dat alle bewijzen inge College en Ambie-
neren, officieren en dienstlieden, eder voor zover dat hem aangeeft, van
de rechts malingen hierin de hand zullen houden, zonder oogleding
of sommen dat personen.

Gedownload Buitenzorg, den 22 November 1905.

J. B. VAN HEUTSZ.

De a^{de} Algemeene Secretaris.

DE GROOT.

Uitgegeven den negenden November 1905.

De a^{de} Algemeene Secretaris.

- DE GROOT.



Catatan:

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1905 No. 550 yang berada di ANRI naskahnya sudah sulit untuk dibaca, beberapa bagian telah koyak dimakan usia. Namun, garis besar isi *staatsblad* tersebut terdapat dalam catatan kaki buku *Politik Islam Hindia Belanda* tulisan H. Aqib Suminto yang ia kutip dari *Perkara Agama Islam Bumiputera* (Batavia: Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, 1920), hlm.

1-25. Adapun garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
- Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan ketertiban umum.
- Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu.
- Guru agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan mempelihatkan daftar itu kepada yang berwenang, keberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang.
- Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.

LAMPIRAN 2

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219.



Nr. 219, 1925

Artikel IV

Deze ordonnantie kan worden aangehouden tot
1926^o.

Artikel V

(1) Op deze in Malouki geschreven voorordening van 1 April 1925, dientelijc, is een
oorkonding door den Gouverneur-Generaal te tekenen.

(2) Bij deze bevoegdheid is op de voorordening van 2 November 1915 (Gouverneur-

een opdat niemand kunnen oefenen op
het Streitkond van Nederlandschen Indië, op
neodig, in de Inlandsche en Chineesche rege-

Gelast en bevolen wordt, dat alle beambten
naren, Officieren en Justitieeren, welke voor
aan de stipte valeling dozer de hand en
huking of aanziet des persoons.

Gedragen te Tjapukai.

D. I

De Algemeen

G. R. ER

Uitgegeven den negentienden Mei 1925.

De Algemeene Secretaris,

G. R. ERDBRINK.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal v.

2-404

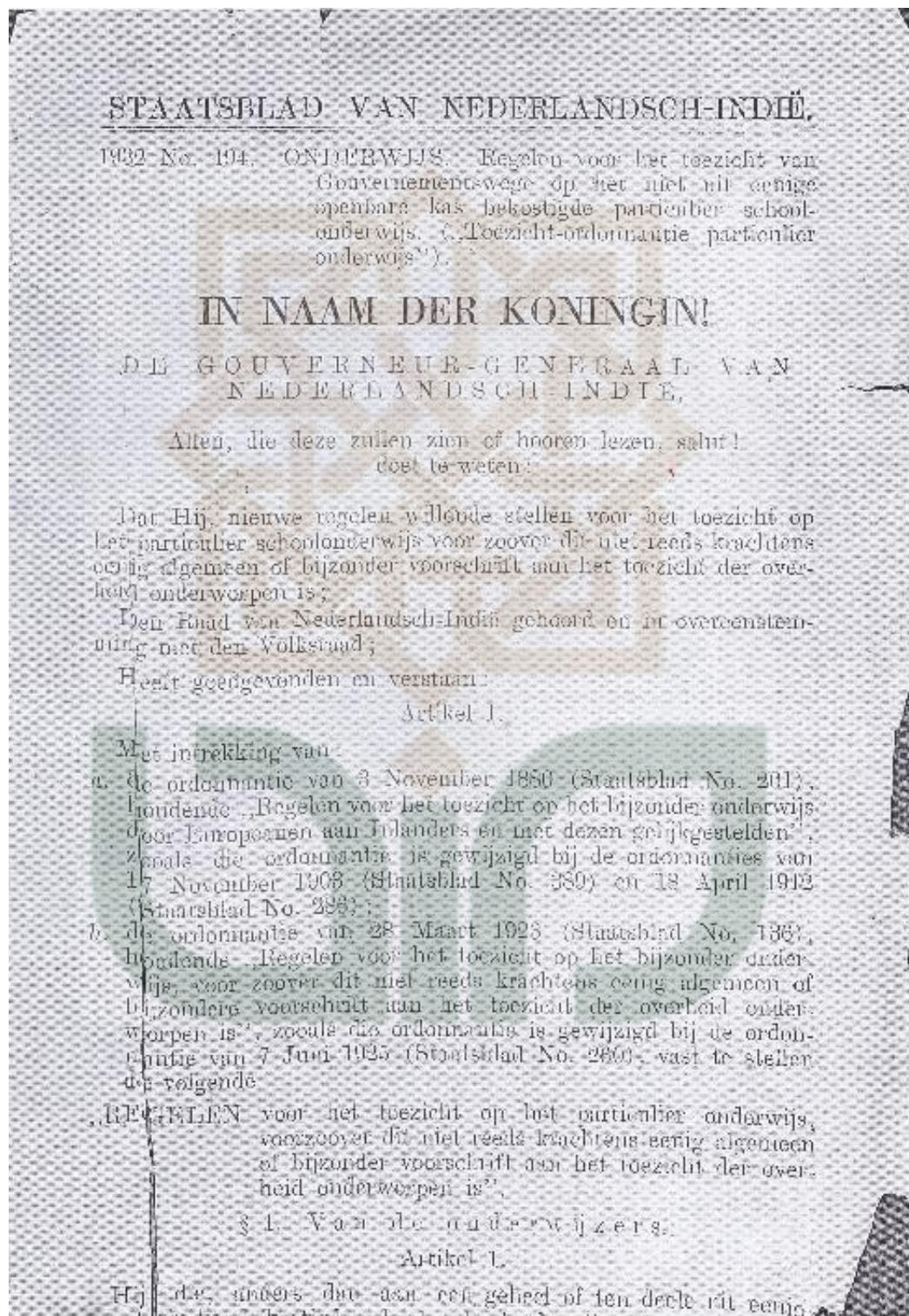
Catatan:

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1925 No. 219 yang berada di ANRI naskahnya sudah sulit untuk dibaca, beberapa bagian telah koyak dimakan usia. Namun, garis besar isi *staatsblad* tersebut terdapat dalam catatan kaki buku *Politik Islam Hindia Belanda* tulisan H. Aqib Suminto yang ia kutip dari *Perkara Bumiputera yang Bersangkutan dengan Agama Islam*, (Weltevreden, 1926), hlm 12-62. Adapun isinya antara lain adalah sebagai berikut:

- Setiap guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya.
- Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang.
- Pengawas dinilai perlu justru memelihara ketertiban keamanan umum.
- Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang.
- Guru agama Islam bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum f. 200,-, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.
- Ordonansi Guru 1925 berlaku sejak 1 Juni 1925, dan Ordonansi Guru 1905 yang berlaku sejak 2 November 1905 dinyatakan dicabut.

LAMPIRAN 3

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1932 No. 494 dan 495



Nr. 494, 1933

2

de schriftelijke vergunning van het Hoofd van gewestelijk bestuur door wie hij op schriftelijke aanvraag wordt verleend voor een of meer plaatsen binnen het door hem bestuurd gewest gelegen.

Artikel 2.

Onder schoolonderwijs verstaat deze ordonnantie alle onderwijs, dat zich niet beperkt tot het onderricht in eenigen godsdienst, godsdienstige richting of leer en gegeven wordt aan personen uit meer dan drie gezinnen.

Artikel 3.

(1) Alvorens een toelating omtrent de ingebrachte aanvraag te nemen, vraagt het Hoofd van gewestelijk bestuur het advies van den betrokken inspecteur van het onderwijs.

(2) Onder betrokken inspecteur van het onderwijs verstaat deze ordonnantie den ambtenaar, die in zijn artikel 8 met het toezicht op het schoolonderwijs is belast.

Artikel 4.

(1) De bij artikel 1 bedoelde vergunning wordt alleen verleend, indien

- a. daarvan geen verstoring van orde en rust is te duchten;
- b. het advies van den betrokken inspecteur van het onderwijs niet ongunstig luidt;
- c. de daartoe strekkende aanvraag vergezeld gaat
- d. van een verklaring, aangegeven door den hoogsten belaagden bestuursambtenaar, voorzover de aanvrager tot de officiële bevolking behoort en in alle andere gevallen door den assistent-resident der woonplaats van den aanvrager, bemande dat deze te geeder naam en faam bekend staat;
- e. van een formeel volgens den Directeur van Onderwijs en Eeredienst vast te stellen model, waarop als gegeven zijn ingevuld, die ter beoordeeling van de aanvraag noodig zijn;
- f. van een bewijs, waaruit blijkt, dat de aanvrager in Nederlandsch een lagere school of in Nederlandsch-Indië een geheel of ten deele uit een openbare kus bekostigde dan wel een door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst daarmee gelijkwaardig verklarde lagere school, waar het Nederlandsch geheel of in hoofdzaak de voertaal is, niet vrucht heeft doorgeloopen.

(2) Indien de aanvrager zich bij zijn onderwijs onsluitende voor een overheersche taal wenscht te bedienen, kan in stede van het in het vorige lid vermelde bewijs voldaan worden met een bewijs waaruit blijkt, dat hij in Nederlandsch-Indië een geheel of ten deele uit een openbare kus bekostigde Hindoestaansche school door 2de klas of een daarmee gelijkwaardige school niet vrucht heeft

(3). Indien de aanvrager zich bij zijn onderwijs van een andere dan de Nederlandse of een inheemse taal wenselijk te bedienen, kan valstaan worden met een verklaring van den betrokken inspecteur van het onderwijs, dat de aanvrager naar zijn voordeel een voldoende ontwikkeling bezit als die, welke het doorlopen van een opleiding voor westerse of inheemse lagere onderwijs in den regel geeft.

Artikel 5.

Personen, die uitsluitend aan volwassenen onderwijs wenschen te geven, behoeven het in artikel 4 onder c, 3e, bedoelde bewijs niet; evenmin wordt daartoe hierdoor het Hoofd van gewestelijk bestuur het advies van den inspecteur van het onderwijs gevraagd.

Artikel 6.

1. Neiging van een aangevraagde vergunning geschriften bij met een onvoldoende beschikking.

Artikel 7.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur kan, den betrokken inspecteur van het onderwijs gehoord, een door hem verleende vergunning in het belang van het onderwijs of van de oecumenische instrekken, hetzij voor enkele tijden, hetzij voor een bepaalde tijde. De instrekking geschiedt bij juist redenering onvoldoende beschikking.

Artikel 8.

Ov. dat in artikel 1 bedoelde schoolonderwijs wordt toezicht gehouden door directeuren van Regeringsverordening aan te wijzen en besturen.

Artikel 9.

1. Bij dat in artikel 1 bedoelde onderwijs geef, is verplicht do in artikel 8 bedoelde directeuren tot de lessen toe te treden en hun alle toelichtingen te verschaffen, welke zij in het belang van het te oecumenen bezielt noodig achtten.

2. Deze directeuren hebben rechts toegang tot alle gebouwen, bestemd voor het geven van onderwijs en het verblijf der leerlingen indien zulke verblijfplaatsen aan de school verbonden zijn.

§ 2. Van de schoolen.

Artikel 10.

Geen school waar dat in artikel 1 bedoelde onderwijs wordt gegeven, mag worden opgericht zonder dat daarvan aan het Hoofd van gewestelijk bestuur kennerzaging is gedaan door indiening van een opevuld formulier volgens een door den Directeur van Onderwijs en Plerodienst vast te stellen model.

§ 3. Strafbeperkingen.

Artikel 16.

- (1) Met hechtenis van ten hoogste 8 dagen of geldboete van ten hoogste 25 gulden wordt gestraft:
- a. hij, die niet in artikel 1 bedoelde onderwijs zonder de vereischte vergunning geeft;
 - b. hij, die in het formulier als bedoeld in artikel 4 sub a, 2e, onjuiste gegevens opneemt;
 - c. hij, die onlatig is in het verstrekken van de in artikel 9 bedoelde inlichtingen;
 - d. hij, die een school opricht zonder de in artikel 10 bedoelde kennisgeving te doen;
 - e. hij, die in het formulier als bedoeld in artikel 10 onjuiste gegevens opneemt;
 - f. hij, die voor de school een benoeming bezigt, die geheel of uiteraard overeenkomt met die welke voor een geheel of gedeeltelijk uit een onenbare kas bekostigde school geldt, zonder dat hij daartoe de in artikel 12 lid 1 bedoelde vergunning heeft gekomen.
- (2) Indien tijdens het plegen van een der in dit artikel onschreyven feiten nog geen 2 jaren verlopen zijn sedert een vroegere veroordeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 maand of geldboete van ten hoogste f. 200.—.
- (3) Indien een bij deze ordonnantie strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur.

Artikel 17.

Daar in artikel 16 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen:

§ 4. Slotbeperking.

Artikel 18.

De ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel: „Toezicht-ordonnantie particulier onderwijs“.

§ 5. Overgangsbeperkingen.

Artikel 19.

- (1) De personen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordonnantie zich bezig houden met het geven van particulier schoolonderwijs als in artikel 1 bedoeld, zijn verplicht om binnen 6 maanden na dat tijdstip de in dat artikel bedoelde vergunning aanvragen te doen.

Nr. 491, 1932

6

(2) Zoolang het Houdt van gewestelijk bestuur omstreng die aanvraag nog geen beslissing heeft genomen, kunnen zij niet hun onderwijs doorgaan. De overige bepalingen deser ordinatie zijn niettemin reeds van toepassing op hen en op het door hen gegeven onderwijs toepasselijk.

Artikel 20.

De bestuurders, of bij gebreke daarvan de leofden der in artikel 10 bedoelde scholen, op het tijdstip van inwerkingtreding van deze ordinatie bestaande, zijn verplicht om binnen 6 maanden na dat tijdstip de in dat artikel bedoelde kennisgeving te doen.

Artikel 21.

(1) Met hechtenis van ten hoogste 8 dager of geldboete van ten hoogste 25 gulden wordt gestraft:

- a. hij, die na het verstrijken van 6 maanden na de inwerkingtreding deser ordinatie voortgaat onderwijs te geven zonder de in artikel 19 bedoelde vergunningsovervraag te hebben ingediend;
 - b. hij, die na het verstrijken van 6 maanden na de inwerkingtreding deser ordinatie een school in slaat houdt zonder de in artikel 20 bedoelde kennisgeving te hebben gedaan.
- (2) De artikelen 16 en 17 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22.

Deze ordinatie treedt in werking met ingang van een edict door den Gouverneur-Generaal te kapelen tijdstip.

Op opinitie niemand hiervan onwettelijkheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden gepubliceerd.

Gedrukt te Batavia, den 17den September 1932.

DE JONGE.

De Algemene Secretaris,

P. J. GERRIKH.

Uitgegeven den zeven en twintigsten September 1932.

De Algemene Secretaris,

P. J. GERRIKH.

(Beeldt van den Gouverneur-Generaal van
17 September 1932 Nr. 311.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

1932 No. 495. ONDERWIJS. Tijdstip van in werking te bringen
van de ordonnantie in Staatsblad 1932 No. 494
,,Toezicht-ordonnantie particulier onderwijs".

Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsch-Indië
van 17 September 1932 No. 31.

Gelet, enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.;

Ten derde: Te bepalen, dat de ordonnantie van 17 September
1932 (Staatsblad No. 494) in werking treedt met ingang van
1 October 1932.

Ten vierde: enz.;

Afschrift, enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-General
van Nederlandsch-Indië:

De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

Uitgegeven den zeven en twintigsten September 1932.

De Algemeene Secretaris,

P. J. GERKE.

.dt

ooging
jk Wet-
voor den
rkgever bij
kel 1603e of
wel krachtens
egeling aan den

LAMPIRAN 4

Staatsblad van Nederlansch-Indie tahun 1906 No. 239.

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE

No. 239. BINNENLANDSCH BESTUUR. DJAMBI. REPRESENTATIEKOSTEN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN. Bestuur over het gewest Djambi. Bezoldiging, toelage voor representatiekosten etc. van den Resident van genoemd gewest.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
van 4 Mei 1906 N° 19.

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Krachtens Koninklijke machtiging het gewest Djambi te stellen onder het bestuur van een Resident op de bij het besluit van 14 Februari 1904 N° 36 (Staatsblad N° 133) vastgestelde bezoldiging van f 1250 (één duizend twee honderd vijftig gulden) 's maands en onder genot van vrije woning.

Ten tweede: Te bepalen, dat de Resident van Djambi gevestigd zal zijn te Djambi.

Ten derde: Bij wijze van tijdelijken maatregel aan den Resident van Djambi toe te kennen een toelage voor representatiekosten van f 50 (vijftig gulden) 's maands; met bepaling voorts:

- 1°. dat bij dienstreizen te land binnen zijn gewest aan genoemden Resident een daggeld van f 15 (vijftien gulden) zal worden te goed gedaan en bij dienstreizen te water een dagdeld van f 7.50 (zeven gulden vijftig cent) teuzij die hoofdambtenaar zelf in de voeding aan boord moet voorzien, in welk geval te water hetzelfde dagdeld wordt genoten als te land;
- 2°. dat ook de kosten van vervoer te water van het gevolg van genoemd Hoofd van gewestelijk bestuur kunnen voor rekening van den Lande.

Ten vierde: Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt tegelijk met het Koninklijk besluit van 1 Februari 1906 N° 54 (Indisch Staatsblad N° 187).

Afschrift enz.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië:
De Algemeene Secretaris.

Uitgegeven den elfden Mei 1906.
De Algemeene Secretaris,
VAN REES.

VAN REES.

Catatan: berisi tentang status Jambi yang berubah menjadi *gewest* atau *keresidenan*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizki Transiska
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sri Agung, 27 Agustus 1996
3. Nama Ayah : Muhammad Nasir
4. Nama Ibu: : Halimah
5. Asal Sekolah : MAN Model Jambi
6. Alamat Kos : Gang Sawit, No. 12. RT 01, RW 01, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Rumah : Jl. Matahari, RT 04, RW 01, Desa Rawamedang, Kec. Batang Asam, Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi.
8. Telepon : 08988110939
9. e-mail : rizkitransiska@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. SDN 165/V Sri Agung | tahun lulus 2008 |
| 2. MTSN Sleman Kerinci | tahun lulus 2011 |
| 3. MAN MODEL JAMBI | tahun lulus 2014 |

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Rizki Transiska